

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik etnis adalah salah satu jenis konflik dimana salah satu pihak yang berkonflik memiliki tujuan secara khusus yang diartikan dalam kerangka etnik dan dimana kesalahan utama dari konflik tersebut adalah karena adanya perbedaan etnis (kemdikbud.com). Konflik etnis bisa saja terjadi karena beberapa faktor seperti sejarah kelompok yang bermasalah, persepsi negatif, stereotipe, keluhan atas adanya diskriminasi budaya, kesempatan pendidikan yang tidak setara, dan pembatasan penggunaan bahasa minoritas.

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman serta kekayaan budaya dimana setiap budaya memiliki ciri khasnya sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, ada lebih dari 300 etnis atau sekitar 1.340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Salah satu etnis yang ada di Indonesia adalah Etnis Tionghoa (Badan Pusat Statistik, 2015). Sensus yang dilakukan setelah masa kemerdekaan tidak mempunyai informasi non etnis dimana ini merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan secara sengaja untuk menghindari pengungkapan ukuran berbagai kelompok etnis karena alasan politik. Menurut data yang ada (Suryadinata, 2003:74), Etnis Tionghoa adalah salah satu golongan minoritas di Indonesia dimana ini dibuktikan pada sensus yang diadakan di tahun 2000. Menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2010 silam, tercatat bahwa persentase masyarakat yang memiliki Etnis Tionghoa di Indonesia mencakup 1,2 persen atau sekitar 2.832.510 jiwa (National Geographic Indonesia, 2021).

Etnis Tionghoa masuk ke Nusantara karena jaringan perdagangan serta kekuasaan yang menyatukan ikatan antar kerajaan yang terikat dengan kepercayaan yang kuat (Aziz, 2021:34). Etnis Tionghoa datang ke wilayah Nusantara terjadi pada 3 fase, antara lain pada masa kerajaan, masa kedatangan Bangsa Eropa, dan masa penjajahan di Belanda. Migrasi yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa disebabkan oleh beberapa faktor seperti perkembangan bahari dan niaga Tiongkok yang memberikan kemungkinan bagi orang Tionghoa untuk mengunjungi berbagai tempat di dunia, Interaksi dengan Tiongkok dengan Asia Tenggara yang membuat wilayah ini menjadi menarik untuk ditempati, pertumbuhan penduduk Tionghoa membuat sempit peluang dalam mencari nafkah, perluasan militer dan industri di Negara Barat memberikan kesempatan bagi

tenaga kerja Tionghoa, kehadiran perusahaan pelayaran Eropa di Tiongkok memberikan kelancaran kerja sama pada bidang perdagangan, serta guncangan dalam negeri mendorong mereka untuk melakukan migrasi secara besar-besaran dari Tiongkok (Aziz, 2021:36).

Sentimen terhadap Etnis Tionghoa sudah ada sejak masa kolonial Belanda dimana hal ini bermula pada tahun 1815, masyarakat di Indonesia di golongkan menjadi “pribumi” dan “orang asing”. Kebijakan segregasi diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan bahwa orang Eropa memiliki status tertinggi dan memiliki hak istimewa atas fasilitas terbaik pada masyarakat. Masyarakat Tionghoa saat itu dianggap lebih rendah dibandingkan orang Eropa dan penduduk pribumi memiliki status yang lebih rendah lagi dibandingkan masyarakat Etnis Tionghoa. Pemisahan kelompok ini sejalan dengan kebijakan “memecah belah” Pemerintah Hindia Belanda (Suryadinata, 2008:58). Adanya pemberian privilege khusus kepada Etnis Tionghoa dibandingkan golongan masyarakat etnis lain membuat posisi Etnis Tionghoa lebih tinggi dibandingkan etnis lain sesuai dengan hukum kolonial Belanda dimana ini adalah kebijakan mengenai kependudukan Pasal 163 Indische StaatSregelling Wet van 2 September 1854, Ned. S. 1854-2, S. 1855-2 jo. Yang membagi penduduk menjadi 3 kelompok yaitu Orang Eropa, Orang Timur Asing seperti China, India, dan Arab; dan Pribumi (kemenkeu, 2022). Selain itu ada kebijakan yang mengatur mengenai daerah tinggal dimana Etnis Tionghoa tempat tinggalnya terpisah dari perkampungan masyarakat non-Tionghoa dan harus mengelompok dengan Etnis Tionghoa lainnya. Kolonialisme Belanda ikut membentuk imaji bahwa orang Tionghoa merupakan “orang asing” yang terpisah dan jauh dengan pribumi. Dari kebijakan VOC, Pemerintah Hindia Belanda hingga Orde Baru, masyarakat Tionghoa kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif yang mempersempit langkah serta gerak sosial mereka (Aziz, 2021:115).

Sumanto al-Qurtuby menyatakan dalam analisisnya bahwa akar dari diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa bermula dari masalah politik dimana masyarakat Tionghoa sebagai kelompok minoritas menjadi tumbal kekuasaan (al-Qurtuby, 2010:185). Pada masa konollianisme Belanda, Etnis Tionghoa di Indonesia berada di kedudukan “orang asing” meskipun semua Orang Tionghoa disetarakan dengan pribumi berdasarkan Peraturan Konstitusi pada tahun 1854 (Aziz, 2021:121). Menurut catatan Coppel, isu anti-China kembali marak di tahun 1880-an dan 1890-an setelah periode Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Kekalahan penduduk Jawa dalam perang melawan Belanda memiliki dampak negatif pada kebjiakan yang merugikan kaum pribumi atau

Etnis Tionghoa. Kebijakan Pemerintah Belanda yang mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan kebijakan politik atau usaha memasifkan pertanian untuk industri, berdampak pada keterpurukan pendudukan pribumi di Jawa. Sentimen anti-Tionghoa ini adalah efek dari kebijakan politik ekonomi Belanda yang menjadikan orang Tionghoa sebagai penarik pajak dan menguasai sektor perdagangan. Kebijakan Politik Etis memberikan efek mempersatukan orang Belanda dengan orang pribumi serta memperkuat prasangka anti-China (Aziz, 2021:16-17).

Pada bulan September tahun 1825 terjadi pembantaian terhadap orang Tionghoa yang meluas di beberapa kota di Jawa Tengah dimana Raden Ayu Yudhakusuma menyerbu tempat tinggal Tionghoa di Ngawi, Jawa Timur (Aziz, 2021:127). Penyebab dari pembantaian yang dilakukan adalah karena kebencian penduduk Jawa kepada orang Tionghoa yang menjadi bandar pemungut pajak. Penduduk pribumi Jawa menganggap bahwa orang Tionghoa adalah pembawa sial dan pemeras (Aziz, 2021:128). Pada tahun 1965 di saat Gerakan 30 September meledak, orang Tionghoa menjadi korban rasial dimana RRC dianggap merupakan penyebab kasus ini terjadi. Setelah kasus September 1965, isu rasial anti-China menjadi luas di beberapa daerah seperti di Makassar pada 10 November 1965, dan kemudian Medan pada 10 Desember 1966. Di Kalimantan Barat banyak orang Tionghoa yang menjadi korban kekerasan pada bulan November tahun 1967 dimana hal ini menyebabkan ratusan korban tewas (thejakartapost, 2017).

Tak berhenti hanya disitu saja, muncul kembali kerusuhan anti-Tionghoa di Bandung pada tahun 1963. Konflik ini dimulai oleh keributan antarmahasiswa pribumi dengan non-pribumi di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Konflik ini kemudian menjalar dengan cepat menjadi isu etnis yang melebar hingga ke kota lain yaitu Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan (Aziz, 2021:129). Akibat yang terjadi akibat kerusuhan ini adalah banyak rumah dan toko di jalan Asia-Afrika, Jalan Braga, Jalan Otto Iskandardinata, dan Pasar Baru memperoleh kerusakan. Berdasarkan laporan yang ada, lebih dari 200 mobil dan sepeda motor dirusak dan dibakar oleh para pemuda (kompasiana.com, 2018). Peristiwa Bandung ini, pada tanggal 6 Mei terjadi peristiwa di Tegal yang kemudian merebak ke kota lain dimana kerusuhan yang terjadi merupakan ungkapan kemarahan terhadap Etnis Tionghoa (Panggabean, 2018:82).

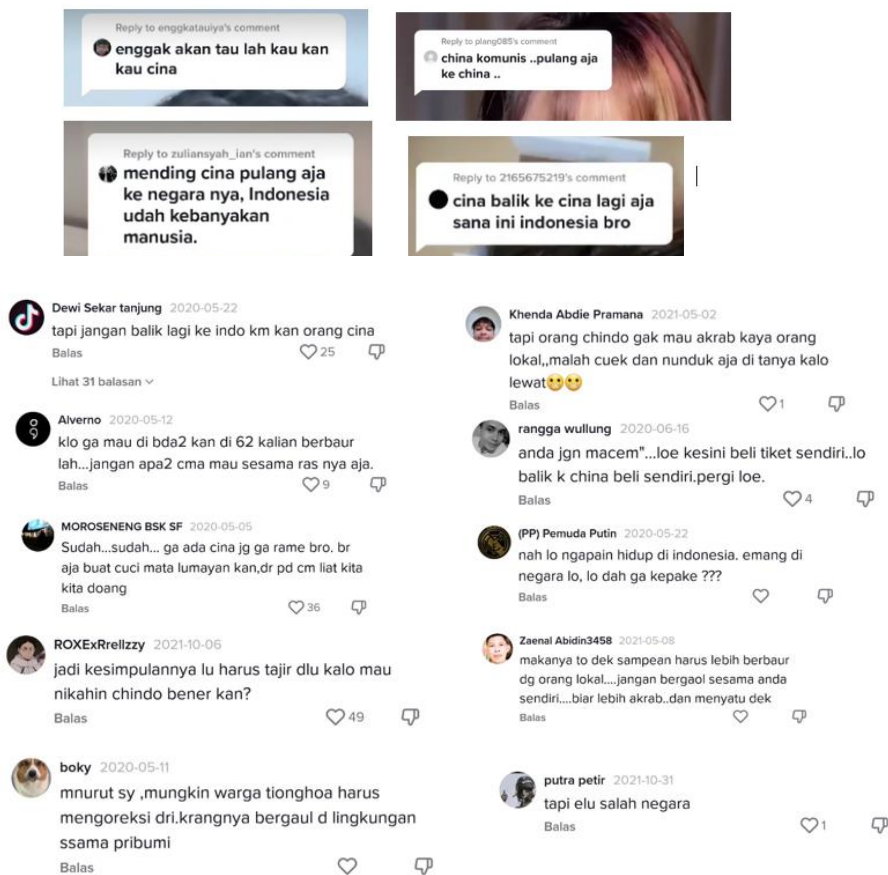
Di masa Orde Baru, muncullah stereotipe yang tumbuh dan kemudian berkembang sehingga melemahkan etnis Tionghoa dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka yang kemudian Etnis Tionghoa dilabeli sebagai “minoritas”. Saat masuk ke rezim Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, muncullah pergolakan politik yang luar biasa dimana

di saat yang bersamaan dengan perubahan politik, Rezim Orde Baru melarang semua hal yang berbau China. Semua kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, kepercayaan, serta adat istiadat China tidak diizinkan untuk dilakukan dimana hal ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 tahun 1967 (cnnindonesia.com, 2021). Tak hanya itu, muncul juga Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang berisi mengenai perubahan nama dimana masyarakat keturunan Tionghoa wajib untuk mengubah nama Cinanya menjadi nama yang memiliki bau Indonesia dan penggunaan bahasa Cina juga tidak diizinkan (kompas.com, 2016).

Leo Suyadinata dalam (Suhandinata, 2009:326) menyatakan terdapat program yang digunakan untuk menindas Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas. Masyarakat Tionghoa dipaksa untuk menghilangkan seluruh entitas yang berkaitan dengan Tionghoa. Pemerintah juga membentuk Badan Koordinasi Masalah Tionghoa yang ditugaskan untuk mengawasi serta membatasi gerak gerak warga Tionghoa. Program asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah cukup berhasil karena berdasarkan survei yang dilakukan di tahun 1990, terdapat sekitar 94% masyarakat Tionghoa yang mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka (Suhandinata, 2009:327).

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2000 membuat orang Tionghoa bebas dari diskriminasi. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (No 6/2000) menjadi pelindung hukum terbebasnya orang Tionghoa dari sikap diskriminatif dimana mereka diizinkan untuk merayakan imlek, mengkespresikan simbol tradisi di ruang publik, serta tampil di ruang publik (Aziz, 2021:200). Meskipun kini kehidupan masyarakat Etnis Tionghoa sudah jauh lebih baik dengan penghapusan beberapa kebijakan yang mendiskriminasi Etnis Tionghoa, namun bukan berarti sikap rasisme terhadap Etnis Tionghoa sudah tidak ada (Melly, 2008:274). Stereotipe lama serta prasangka negatif terhadap masyarakat keturunan Tionghoa masih bertahan meskipun sudah hampir dua dekade reformasi kebijakan dan masyarakat (Setijadi, 2017:4). Umumnya, dalam sepanjang sejarah Indonesia, sentimen anti-Cina mempunyai persinggungan yang rumit dengan masalah kelas dan agama dimana ini menjadi faktor penting yang membentuk persepsi masyarakat pribumi kepada masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia (Wilson, 2017). Bahkan sentimen anti-Tionghoa masih terus berlanjut hingga menimbulkan hate speech di sosial media. Salah satu komentar buruk untuk keturunan Tionghoa di Indonesia dirasakan oleh para influencer seperti @cia.hartono, @unusedacceve, @stanleyhao, @shellychandra01, dan @andryzhuo2.

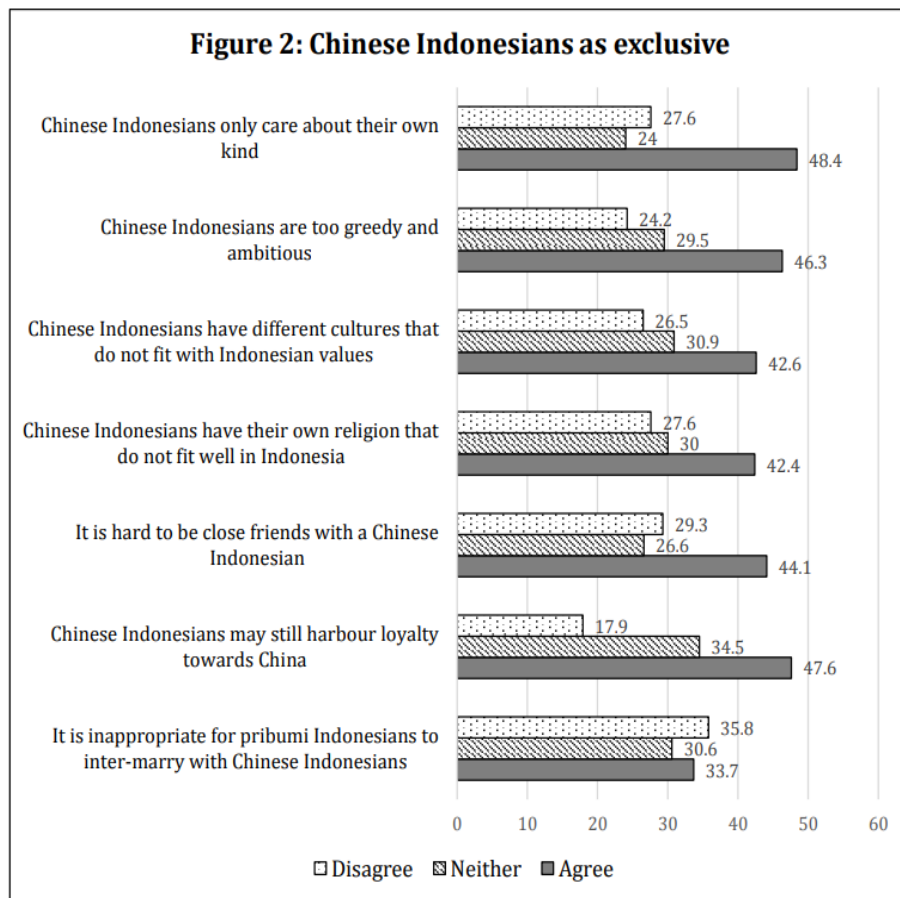
Gambar 1.1 komentar negatif yang ditujukan kepada Etnis Tionghoa



Sumber : Komen media sosial

Menurut Pengamat kebudayaan Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto, saat ini perkembangan nasib orang keturunan Tionghoa di Indonesia sudah ke arah yang lebih baik, namun masalah rasial masih tetap ada (cnnindonesia.com, 2021). Johanes juga menjelaskan bahwa permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat keturunan Tionghoa bukan lagi mengenai peraturan, melainkan prasangka negatif serta stereotipe masyarakat. Pada bulan Mei tahun 2016 lalu, ISEAS-Yusof Ishak Institute melakukan survei nasional Indonesia untuk mengetahui masih adanya prasangka negatif serta stereotipe terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia hingga saat ini (Setijadi, 2017:4). Dari hasil survei, didapatkan data bahwa alasan sentimen terhadap Etnis Tionghoa adalah karena Orang Tionghoa Indonesia dominan dalam hal perekonomian Indonesia, Etnis Tionghoa dianggap hanya mau peduli pada sesamanya serta dianggap serakah atau ambisius, dan adanya pengaruh Etnis Tionghoa di bidang politik (Setijadi, 2017:4-8).

Gambar 1.2 Tabel survei project Indonesia Nasional



Sumber: Indonesia National Survei Project

Dari data yang didapat dari Indonesia National Survei Project, bisa dilihat bahwa sebesar 48,4 persen masyarakat pribumi merasa bahwa Etnis Tionghoa di Indonesia cenderung hanya peduli dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Sebesar 46,3 persen responden setuju bahwa Etnis Tionghoa di Indonesia serakah dan terlalu ambisius. Sebesar 42,6 persen responden setuju bahwa Etnis Tionghoa di Indonesia memiliki budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebesar 42,4 persen responden setuju bahwa Etnis Tionghoa di Indonesia memiliki agama atau kepercayaan yang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia. Sebesar 44,1 persen responden setuju bahwa sulit untuk dekat dengan Etnis Tionghoa di Indonesia. Sebesar 47,6 persen responden setuju bahwa Etnis Tionghoa di Indonesia masih menyimpan kesetiaan pada negara China dan sebesar 33,7 persen responden setuju dengan statement bahwa pribumi Indonesia tidak pantas untuk melakukan kawin campur dengan Etnis Tionghoa di Indonesia (Setijadi, 2017:7).

Di tahun 1974, peluang mahasiswa keturunan Tionghoa di Indonesia untuk bersekolah di Perguruan Tinggi Negeri sangat terbatas. Mahasiswa keturunan Tionghoa di Indonesia yang bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri hanya 5 hingga 10 persen dari total mahasiswa yang diterima (Chua, 2004:465-479). Hal ini menyebabkan mahasiswa keturunan Tionghoa memutuskan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau masuk ke Perguruan Tinggi Swasta (Turner, 2007:112-127). Hal ini juga terjadi hingga kini dimana saat ini banyak dari masyarakat keturunan Tionghoa yang memutuskan untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri. Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami peningkatan dimana hal ini dicatat oleh pddikti. Kemendikbud.go.id. Saat ini, jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia mencapai 4.593 (Kemendikbud, 2020).

Menurut data statistik pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di tahun 2020, jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia terdapat 122 universitas dan jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia mencapai 3.044 (Kemendikbud, 2020). Meskipun saat ini masyarakat keturunan Tionghoa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, namun mereka lebih banyak memilih untuk bersekolah di Perguruan Tinggi Swasta atau bahkan ke luar negeri.

Menggunakan web quora.com, dengan pertanyaan “Mengapa jarang sekali keturunan Etnis Tionghoa yang bersekolah di Negeri?”, beberapa masyarakat keturunan Etnis Tionghoa berusaha untuk menjawab dan menjelaskan alasannya seperti yang diceritakan oleh salah satu seorang mahasiswa Etnis Tionghoa yang mendapatkan pengalaman kurang baik di Perguruan Tinggi Negeri. Username “anonim” menceritakan bahwa dirinya saat itu adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi terbaik di Bandung di jurusan FSRD. Di jurusan itulah, mahasiswa Etnis Tionghoa ini menjadi minoritas di tengah banyaknya etnis non-Tionghoa di jurusan itu. Anonim menceritakan bahwa ada salah satu asisten dosen di jurusan tersebut yang selalu menyindir mahasiswa ini dengan perkataan yang kurang pantas, seperti:

“Kamu cina ya? Kok kamu item sih gak kaya cina lain?”

“Aduh emang ya udah Kristen, cina lagi.”

“Kamu kan cina, ngapain masuk FSRD PTN?”

Korban dengan username “anonim” ini mengaku bahwa dirinya merasa sedih karena dirinya mendapatkan perlakuan yang berbeda padahal ia juga bagian dari masyarakat Indonesia dan merupakan Warga Negara Indonesia. Dari cerita yang dibagikan oleh “anonim” mengenai perlakuan kurang baik yang dirasakannya sebagai mahasiswa Tionghoa memberikan bukti

secara nyata bahwa hingga kini masih ada perlakuan kurang baik yang ditujukan kepada masyarakat Etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk dalam dunia pendidikan atau di dalam lingkungan kampus.

Namun ada 1 orang guru (belakangan saya ketahui dia salah satu asdos di FSRD PTN tsb), sosoknya tinggi besar dan gondrong, selalu menyindir saya setiap kelas dan saat ada desi tanya jawab. Fyi, saya chinese, perempuan, tidak terlalu putih seperti chinese lainnya, tapi tetap saya menonjol kalau berdiri disebelah teman2 mayoritas saya.

Awalnya saya sabar2in. Tapi lama2 nyelekit juga, mulai banyak kata2 yang menyakitkan, saya dulu yang masih SMA ingin menangis setiap dikata2in seperti itu. Misal:

"Kamu cina ya? Kok kamu item sih gak kaya cina lain?"

"Aduh emang ya udah Kristen, cina lagi."

"Kamu kan cina, ngapain masuk FSRD PTN(yang saya mau tsb)?"

Saya cuma bisa diam karena saya tau saya tidak ada apa adanya dibanding dia yang notabene seorang guru, dan calon dosen saya nantinya.

Kalau diingat sedih sekali rasanya, padahal saya lahir dan besar di Indonesia, bicara bahasa mandarin saja tidak bisa. Saya kadang berpikir, apa sih yang membedakan pribumi dan non pribumi? Wong status nya sama2 WNI, sama2 lahir dan besar disini, sama2 menjunjung NKRI.

Gambar 1.2. Foto yang diposting dengan cerita pengalaman Etnis Tionghoa dalam menentukan Perguruan Tinggi

Pernyataan lain muncul dari Ruddy Santoso yang menjelaskan mengapa banyak keturunan Etnis Tionghoa yang jarang untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri karena faktor histori terdahulu. Ruddy juga menjelaskan bahwa alasan lebih banyak mahasiswa Etnis Tionghoa adalah karena banyaknya pengalaman kurang baik yang dirasakan para pendahulu dimana mereka diperlakukan secara berbeda di zamannya. Tak hanya itu, Ruddy juga berpendapat bahwa alasan mahasiswa Etnis Tionghoa memilih untuk melanjutkan studi di Perguruan tinggi Swasta adalah karena perasaan takut akibat stereotipe yang sering ditujukan kepada Etnis Tionghoa. Namun di akhir, Ruddy juga menjelaskan bahwa kini zaman sudah berubah dimana anak-anak zaman sekarang lebih open minded dan prasangka mengenai pribumi dan Etnis Tionghoa sudah tidak separah dahulu. Dari cerita yang dibagikan oleh Ruddy, bisa disimpulkan bahwa dampak dari sejarah Etnis Tionghoa dari zaman kolonialisme hingga pasca reformasi sangat membekas dalam benak masyarakat Etnis Tionghoa.

Semula Dijawab: Kenapa kebanyakan etnis Tionghoa Indonesia berkuliah di universitas-universitas Kristen swasta? Adakah alasan khususnya? Semisal mencari pergaulan dengan teman seiman?

Mayoritas ya meski tidak semua..saya rasa cukup banyak pula etnis tionghoa yg bersekolah di sekolah atau perguruan tinggi..

Tp kita hidup di jaman yg berbeda dengan orang tua kita...

Cara kita melihat dunia juga beda...

Dan jika ditelaah keturunan china diindonesia pada jaman dl diperlakukan berbeda...mungkin kamu sudah mendengar secara garis besar tetapi berbeda dengan orang tua tionghoa yg merasakan di jaman dl..

Selalu ada ketakutan tersendiri...stereotype yg ada sampai sskarang juga banyak yg menyudutkan etnis tionghoa (saya rasa kalian akan paham maksud saya)

Untuk masalah pergaulan saya rasa untuk sekarang anak2 muda lebih open minded..pada dasarnya saat masuk dunia kerja tidak ada perbedaan mana pribumi mana etnis tertentu..sama saja..kecuali memang pada dasarnya orang tersebut rasis

Gambar 1.2. Foto yang diposting dengan cerita pengalaman Etnis Tionghoa dalam menentukan Perguruan Tinggi

Pernyataan lainnya mengenai pertanyaan “Mengapa orang Tionghoa Indonesia cenderung kuliah di universitas swasta dibanding bersekolah di kuliah di universitas negeri?” yang ada di Quora dijawab oleh Linda. Dirinya bercerita alasan dirinya takut untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri karena takut mendapat perlakuan diskriminasi. Linda juga menyatakan bahwa di tahun 2020 pun masih ada perlakuan yang kurang baik yang ditujukan untuk Etnis Tionghoa. Linda juga berpendapat, faktor sedikitnya mahasiswa Etnis Tionghoa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri bukan karena mereka tidak mampu untuk melewati masa tes untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, namun karena mereka memilih untuk menghindari konflik sosial dan pemahaman ini sudah turun menurun ke generasi berikutnya. Hal ini yang membuat jarang sekali ada mahasiswa Etnis Tionghoa yang masuk di Perguruan Tinggi Negeri.

karena takut dpt perlakuan diskriminasi, ini sama aja seperti banyak orang Tionghoa indonesia ga mau daftar cpns, tni atau polisi (atau sedikit). Dan jika anda berpikir ini sdh 2020 kayanya hal-hal seperti itu sudah tidak ada, salah besar! tidak mengerti kenapa jaman semakin maju tapi di indonesia kita blm bisa pulih dari isu ini. Makanya banyak orang Tionghoa memilih bisnis. Bukan karena kemampuan orang Tionghoa tidak mampu untuk melewati tes-tes sulit, sesungguhnya mereka sangat mampu, tapi memang akhirnya pilihan mereka menghindari konflik sosial dan pemahaman ini menurun ke generasi-generasi berikutnya.

1,4 rb tayangan · Lihat dukungan naik

3

Gambar 1.2. Foto yang diposting dengan cerita pengalaman Etnis Tionghoa dalam menentukan Perguruan Tinggi

Dari ketiga pengalaman yang dibagikan oleh informan, bisa disimpulkan bahwa alasan mengapa banyak mahasiswa Tionghoa yang memutuskan untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Swasta dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri adalah karena adanya prasangka serta rasa takut bahwa dirinya akan mendapatkan perlakuan kurang baik jika berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri karena dirinya adalah minoritas. Selain itu faktor

histori sangat memberikan dampak yang besar bagi Etnis Tionghoa dalam menentukan perguruan tinggi. Hal ini membuat Etnis Tionghoa lebih memilih untuk menghindari konflik dengan cara melanjutkan studi di perguruan tinggi swasta.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Indonesia sebagai negara dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kesadaran bahwa adanya keberagaman suku di Indonesia mampu membawa individu untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk saling menghormati dan menghargai etnis lain. Kekayaan ragam di Indonesia bisa menjadi kekuatan dimana untuk kedaulatan di atas keragaman serta bisa menjadi risiko yaitu munculnya konflik yang disebabkan oleh keragaman yang ada.

Salah satu etnis yang juga mendapat prasangka negatif di Indonesia adalah Etnis Tionghoa. Stereotipe atau prasangka negatif mengenai Etnis Tionghoa sudah mengakar sejak zaman kolonialisme hingga pasca reformasi. Histori yang memuat perlakuan kurang baik yang ditujukan kepada Etnis Tionghoa membuat mereka takut dan memiliki prasangka terhadap etnis non-Tionghoa dan hal ini tentunya memiliki pengaruh dalam cara mereka mengambil keputusan, salah satunya adalah mengambil keputusan untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi negeri. Mayoritas masyarakat keturunan Tionghoa lebih memilih untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta dengan alasan yang begitu beragam.

Prasangka negatif yang sering didapatkan oleh Etnis Tionghoa membuat mereka lebih merasa nyaman dengan bergaul dengan kelompok etnisnya saja dimana hal ini terlihat jelas dari banyaknya jumlah mahasiswa Etnis Tionghoa yang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri. Masyarakat Etnis Tionghoa lebih memilih untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Swasta dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri untuk menghindari perlakuan buruk.

Bentuk respon terhadap masalah di atas, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membantu untuk mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemilihan institusi yang dilakukan mahasiswa Etnis Tionghoa dalam melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi?
- b. Apakah prasangka mendasari Etnis Tionghoa dalam memilih Perguruan Tinggi?
- c. Bagaimana pengalaman dan strategi untuk melakukan interaksi dengan etnis non-Tionghoa di perguruan tinggi?

Berangkat dari hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemilihan institusi yang dilakukan mahasiswa Etnis Tionghoa untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami latar belakang pemilihan institusi yang dilakukan mahasiswa Etnis Tionghoa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dan memahami pengalaman interaksi mahasiswa etnis Tionghoa di Perguruan Tinggi.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menjadi pengetahuan yang mendalam mengenai studi fenomenologis mengenai pemilihan institusi yang dilakukan oleh mahasiswa Etnis Tionghoa untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengalaman pemilihan institusi yang dilakukan mahasiswa Etnis Tionghoa untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri

1.4.3 Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya yang ada dengan melihat pengalaman komunikasi antarbudaya mahasiswa Etnis Tionghoa sebagai minoritas di Perguruan Tinggi Negeri.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 Paradigma Penelitian

Penelitian mengenai “Pengalaman Pengambilan Keputusan untuk Masuk ke Perguruan Tinggi Negeri Pada Mahasiswa Etnis Tionghoa” ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif memfokuskan penelitian mengenai cara individu dalam memaknai kehidupan sosial, serta bagaimana individu mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, atau ritual sosial. Paradigma interpretif akan melihat bagaimana pengalaman

subjektif individu dalam melakukan hubungan dengan individu lainnya dan kaitannya dengan perilaku sosial kepada suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Paradigma interpretif akan melihat realitas sosial sebagai suatu hal yang dinamis, berproses, serta penuh dengan makna subjektif (Daymon dan Holloway, 2008:5). Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena pemilihan perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa Etnis Tionghoa. Dalam hal ini, penelitian interpretif dipakai untuk membantu memahami apa saja faktor pemilihan perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa Etnis Tionghoa

Paradigma interpretif dinilai sesuai dengan landasan dasar pada penelitian ini karena memberikan penjelasan mengenai bagaimana mahasiswa Etnis Tionghoa dengan lingkungan baru yaitu di Perguruan Tinggi Negeri. Sejalan dengan paradigma interpretif yang digunakan sebagai dasar dari pemikiran pada penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian pada pandangan fenomenologi berupaya untuk memahami makna dari suatu peristiwa serta kaitannya terhadap orang-orang yang ada pada situasi tertentu (Moleong, 2018:17). Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui apa saja pertimbangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa Etnis Tionghoa ketika memutuskan untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Fenomenologi adalah cara yang dipakai untuk memahami dunia lewat pengalaman secara langsung (Littlejohn, 1999:57).

1.5.2 State of The Art

Penelitian adalah suatu proses yang bersifat dinamis dimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan selalu ada penelitian lain sebelum terlaksananya suatu penelitian yang baru. Beberapa penelitian terbaru terkait penelitian ini adalah:

Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian berjudul “Stereotipe dan Komunikasi Interpersonal Antara Etnis Aceh dan Etnis Tionghoa” oleh Febri Nurrahmi tahun 2019 di Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemberian stigma serta sikap rasisme yang ditujukan oleh kelompok Etnis Tionghoa yang ada di Aceh sebagai minoritas. Bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh remaja pria Etnis Tionghoa di Aceh ia merasa trauma jika masuk ke suatu lingkungan perkampungan di Aceh karena selalu diteriaki “Cina” dan ditakut-takuti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Pembelajaran Sosial

dimana teori ini menyatakan bahwa prasangka negative bisa dipatahkan menggunakan proses pembelajaran dimana pembelajaran akan menghasilkan persepsi yang baik atau positif terhadap Etnis Tionghoa. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa untuk mencapai komunikasi interpersonal yang efektif antara kelompok Etnis Tionghoa dengan masyarakat Aceh, diperlukan beberapa hal seperti adanya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, serta kesetaraan.

Kemudian penelitian selanjutnya berjudul “Akomodasi Komunikasi Etnis Tionghoa dan Sunda di Surya Kencana Bogor” oleh Aprilyanti Pratiwi tahun 2021 di Universitas Pancasila. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya stigma serta citra negatif yang ditujukan kepada masyarakat Etnis Tionghoa. Masyarakat Etnis Tionghoa juga ditekan secara terus menerus dan dipaksa untuk berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia. Etnis Tionghoa juga dipandang sebagai kelompok budaya yang hanya mau berdekatan dengan sesama kelompok nya saja dan tidak mau berbaur. Penelitian ini ingin meneliti bahwa Etnis Tionghoa Surya Kencana melakukan akomodasi komunikasi karena adanya rasa terpaksa. Namun seiring berjalannya waktu, ada umpan balik positif yang ditunjukkan oleh kelompok Etnis Sunda karena kedua etnis sama-sama saling melakukan konvergensi, divergensi, serta akomodasi. Dalam melakukan perbincangan sehari-hari, Etnis Tionghoa mencampur Bahasa Indonesia dengan Bahasa Sunda dan konvergensi yang dilakukan oleh kelompok Etnis Sunda adalah menyapa Etnis Tionghoa sesuai dengan sapaan etnisnya yaitu “koko” atau “cici”. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi akomodasi atau Accomodation Communication Theory (ACT).

Penelitian selanjutnya memiliki judul “Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta” oleh Verbena Ayuningsih Purbasari tahun 2019 di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejadian pasca reformasi tahun 1998 dimana pada masa itu muncul beragam isu mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia dimana isu ini cenderung kurang tepat dan menggiring opini masyarakat untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok Etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini membuat Etnis Tionghoa sulit untuk diterima di beberapa daerah. Namun di Surakarta, kelompok Etnis Tionghoa dan masyarakat lokal hidup dengan baik karena adanya penyusunan strategi interaksi serta komunikasi yang dilakukan. Di tengah rasisme serta sentimen Anti-Tionghoa, kelompok Etnis Tionghoa dan masyarakat lokal justru memperkuat upaya rekonsiliasi dan integrasi demi menjaga kedamaian hubungan yang

telah terbentuk. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi yang terdiri dari beragam aspek kehidupan masyarakat.

Penelitian berjudul “Stereotipe Mahasiswa Minangkabau Terhadap Mahasiswa Aceh” oleh Yola Novita Putri tahun 2020 di Universitas Malikussaleh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keragaman suku di Universitas di Aceh dimana salah satu suku yang mendominasi adalah mahasiswa dari Suku Minangkabau. Mahasiswa Suku Minangkabau memiliki stereotipe terhadap mahasiswa Aceh dimana mereka menganggap bahwa mahasiswa Aceh bersikap kasar karena ketika berkomunikasi selalu menggunakan intonasi yang tinggi. Tak hanya itu, namun mahasiswa Aceh dianggap cukup egois karena dianggap kuat dari segi agama. Stereotipe yang terbentuk oleh mahasiswa Etnis Minangkabau kepada Etnis Aceh dilatarbelakangi oleh pengalaman intraksi mereka yang digeneralisasikan baik itu positif atau negatif sehingga berdampak kepada seluruh mahasiswa Aceh dimana sebenarnya tidak semua Suku Aceh memiliki kategori sesuai dengan apa yang sudah di stereotipekan oleh Etnis Minangkabau. Stereotipe yang dihasilkan berpengaruh terhadap komunikasi antarbudaya dimana komunikasi antarbudaya tidak terjadi akibat keengganan akibat stereotipe tersebut. Stereotipe negatif yang kuat membuat individu lebih memilih untuk menjauh dibandingkan berkomunikasi. Stereotipe yang ada juga menghasilkan hal negatif yang bisa mempengaruhi kualitas serta intensitas komunikasi dimana hal ini bisa berujung ada tindakan diskriminasi serta rasisme.

Penelitian berjudul “Prasangka Terhadap Etnis Tionghoa di Pariaman” oleh Putri Novita Sari tahun 2020 di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat lokal yang belum bisa menerima kedatangan kelompok Etnis Tionghoa. Meskipun kelompok Etnis Tionghoa merupakan kelompok minoritas di Indonesia, namun mereka memberikan pengaruh yang cukup besar baik di bidang ekonomi, budaya, politik, dan agama. Penolakan terhadap Etnis Tionghoa dikarenakan adanya stereotipe, prasangka, serta diskriminasi yang dialami oleh kelompok Etnis Tionghoa. Dengan adanya prasangka, stereotipe, serta rasisme antar kelompok bisa menciptakan komunikasi lintas budaya yang tidak efektif. Hal ini juga bisa memicu timbulnya konflik antar etnis. Masyarakat lokal memandang Etnis Tionghoa sebagai orang yang culas dan pelit. Adanya persepsi yang negatif mengenai masyarakat Etnis Tionghoa membuat komunikasi antarbudaya terhambat sehingga komunikasi pun tidak bisa terjadi dengan baik.

Dari beberapa penelitian di atas, bisa disimpulkan bahwa individu umumnya pernah merasakan pengalaman didiskriminasi atau mendapatkan perlakuan rasisme karena identitas budaya yang dianutnya. Individu cenderung akan merasa lebih nyaman ketika berada di lingkungan budayanya karena merasa lebih mudah untuk berkomunikasi karena dirinya memiliki identitas budaya dan latar budaya yang sama. Ketika individu ditempatkan pada lingkungan budaya yang berbeda dengan dirinya, akan muncul perasaan tidak nyaman karena tingginya ketidakpastian karena individu tidak memiliki banyak pengetahuan serta informasi. Perlakuan rasisme yang dirasakan oleh individu bisa membuat individu cenderung tidak memiliki motivasi untuk melakukan komunikasi dengan orang lain dan membatasi komunikasi mereka.

Relevansi beberapa jurnal di atas dengan topik penelitian Interaksi Kelompok Tionghoa dengan Etnis Non-Tionghoa Dalam Perguruan Tinggi Negeri: Studi Tentang Pemilihan Institusi Perguruan Tinggi oleh Mahasiswa Etnis Tionghoa adalah penelitian ini berfokus pada interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa Etnis Tionghoa dan Etnis Non-Tionghoa di Perguruan Tinggi Negeri. Keterkaitan pada penelitian yang akan dilaksanakan dengan beberapa contoh penelitian di atas adalah untuk menguji kembali bahwa prasangka yang ditujukan pada suatu kelompok budaya tertentu dapat membuat komunikasi antarbudaya terhambat dan tidak bisa berjalan dengan baik.

1.5.3 Interaksi Antarbudaya

Komunikasi dan budaya merupakan kedua hal yang tidak bisa dipisahkan dimana menurut Alfred G. Smith, budaya merupakan kode yang dipelajari dan dibagikan oleh manusia, sedangkan untuk bisa berbagi dan belajar, manusia membutuhkan komunikasi (Jandt, 2018:74). Setiap pola budaya serta setiap tindakan perilaku sosial yang dilakukan oleh manusia selalu melibatkan komunikasi. Budaya tidak bisa dipahami tanpa mempelajari komunikasi dan komunikasi hanya dapat dimengerti dengan pemahaman mengenai budaya yang didukungnya. Komunikasi antarbudaya merupakan terjadinya proses komunikasi antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda (Neuliep, 2018:59). Kesuksesan dalam melakukan komunikasi antarbudaya membutuhkan tingkat kompetensi komunikasi yaitu kognitif, afektif, dan juga perilaku. Komponen kognitif mengarah pada seberapa banyak yang dipahami seseorang mengenai komunikasi. Komponen aktif merujuk pada motivasi individu untuk melakukan pendekatan atau menghindari komunikasi. Komponen

perilaku merujuk pada keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan interaksi secara kompeten (Neuliep, 2018:66). Seorang komunikator yang kompeten dalam interaksi antarbudaya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan komunikasi, memiliki pengetahuan bagaimana berkomunikasi, serta terampil dalam berkomunikasi.

1.5.4 Prasangka

Prasangka adalah perasaan negatif yang dalam kepada kelompok budaya tertentu. Sentimen ini bisa terjadi dalam bentuk kemarahan, ketakutan, kebencian, serta perasaan cemas (Samovar, 2010:207). Prasangka adalah generalisasi kaku serta menyakitkan tentang sekelompok orang dimana individu mempunyai sikap yang tidak fleksibel yang didasarkan atas sedikit atau tidak adanya bukti sama sekali.

Pada konteks komunikasi, perasaan serta perilaku negatif sasaran prasangka ditunjukkan melalui penggunaan label, humor yang menyebabkan permusuhan, atau pidato yang menyatakan sikap superioritas suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Prasangka menjadi salah satu rintangan atau hambatan yang berat bagi proses kegiatan komunikasi karena individu yang memiliki prasangka sudah cenderung was-was dan ebsikap curiga sebelum memulai interaksi sehingga menentang komunikator yang melancarkan komunikasi (Liliweri, 2018:371). Dalam prasangka mengandung tiga tipe, yaitu (1) afektif dimana hal ini berkaitan dengan perasaan yang negatif, (2) kognitif yang selalu berpikir mengenai suatu stereotipe, dan (3) behavioral yang adalh tindakan dalam bentuk diskriminasi (Liliweri, 2018:372).

Prasangka antar-ras atau antaretnik adalah suatu sikap negatif yang ditujukan kepada kelompok antar-ras atau antaretnik tertentu serta berfokus pada ciri-ciri yang cenderung negatif. Johnson (1997:328) menyatakan bahwa prasangka terjadi karena: (1) gambaran perbedaan antara kelompok, (2) nilai-nilai budaya yang dianut kelompok dominan sangat menguasai kelompok minoritas, (3) stereotipe antaretnik, (4) kelompok etnik atau ras merasa superior sehingga membuat etnik atau ras lainnya menjadi inferior. Sedangkan menurut Zastrow (1989), prasangka bisa berasal dari: (1) proyeksi (usaha individu dalam mempertahankan ciri kelompok etnis secara berlebihan), (2) frustrasi, agresi, serta perasaan kecewa yang mengarah pada sikap menentang, (3) berhadapan dengan ketidaksamaan serta kerendahdirian, (4) kesewenang-wenangan, (5) alasan historis, (6) persaingan yang dilakukan secara tidak sehat dan mengarah pada

eksploitasi, (7) cara sosialisasi yang dilakukan secara berlebihan, (8) dan memandang kelompok lain dengan sikap yang kurang baik.

1.5.5 Co-Culture Theory

Teori Co-Culture dikembangkan oleh Mark Orbe dimana teori ini berbicara mengenai interaksi yang dilakukan antara individu dari kelompok minoritas dan perwakilan dari kelompok dominan. Teori Co-Culture cukup berbeda karena komunikasi budaya diartikan dari sudut pandang anggota kelompok yang minoritas atau kurang terwakili saat mereka menganggap perbedaan budaya sebagai hal yang menonjol. Teori ini dibuat untuk memberikan fasilitas pemahaman mengenai bagaimana anggota kelompok budaya bersama menegosiasikan perbedaan budaya mereka dengan individu lain.

Budaya dan komunikasi merupakan hal yang saling berkaitan. Kata Co-Culture digunakan untuk menghindari konotasi negatif atau inferior dari deskripsi masa lalu serta mengakui keragaman budaya, meskipun budaya bersama yang ada di sekitar kita seringkali dibuat tidak terlihat oleh budaya dominan (Orbe, 1998:1). Teori Co-Culture didasarkan pada keyakinan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan masing-masing secara bersamaan dan terpisah dari budaya lain (Orbe, 1998:2). Kata budaya bersama dianut di atas terminology lain untuk memberikan gagasan bahwa tidak ada satu pun budaya dalam masyarakat kita yang secara inheren lebih unggul dari budaya lain yang hidup berdampingan. Co-Culture juga merupakan hal yang penting dalam cara mereka mempengaruhi komunikasi anggota kelompok. Beragamnya Co-Culture yang ada dalam masyarakat membuat teori Co-Culture didasarkan pada gagasan bahwa seiring berjalannya waktu, suatu budaya akan mendapatkan status kelompok dominan di lembaga masyarakat utama di seluruh negeri (Orbe, 1998:2).

Teori Co-Culture dilandasi oleh lima asumsi, antara lain (1) ada hierarki di masyarakat yang mengistimewakan kelompok tertentu; (2) anggota dominan menduduki posisi kekuasaan yang memberikan kemungkinan mereka untuk membentuk serta mempertahankan sistem yang mampu memperkuat pandangan serta pengalaman mereka serta membungkan orang lain; (3) sistem komunikasi kelompok dominan memiliki fungsi untuk menjaga anggota kelompok budaya bersama ada di luar pusat kekuasaan; (4) walaupun ada variasi yang cukup besar di antara budaya bersama, mereka saling berbagi posisi sosial yang terpinggirkan dalam sistem yang dominan

serta; (5) anggota kelompok budaya bersama melakukan komunikasi secara strategis untuk menegosiasikan sistem dominan di tempat mereka berada (Littlejohn, 2011:217). Teori ini ada dari serangkaian studi mengenai bagaimana anggota kelompok yang tersingkirkan melakukan komunikasi dengan anggota budaya dominan.

Orbe dan rekannya melakukan identifikasi praktik budaya bersama yang digunakan oleh anggota kelompok budaya bersama dimana mereka mengidentifikasi strategi yang digunakan dalam melakukan komunikasi, apakah individu berusaha untuk menekankan kesamaan, menghindari kontroversi, kompensasi berlebihan, tawar-menawar, memisahkan, mencerminkan, mengejek diri sendiri, mendidik orang lain, menghindari, atau menyerang (Jandt, 2018:65). Ada enam faktor yang mampu mempengaruhi pemilihan strategi, antara lain (1) hasil yang disukai yaitu asimilasi, akomodasi, atau pemisahan; (2) berdasarkan bidang pengalaman yaitu repertoar kemungkinan tanggapan untuk anggota budaya bersama yang diberikan; (3) kemampuan; (4) konteks situasional dimana khususnya interaksi; (5) biaya serta imbalan yang dirasakan; (6) pendekatan komunikasi yaitu tegas, tidak tegas, atau agresif (Orbe, 1997:31). Faktor-faktor ini saling bergantung serta menciptakan matriks pemahaman serta tindakan yang membingkai respon budaya pada setiap interaksi. Dengan fokus eksplisit pada interaksi strategis, teori co-culture menjelaskan banyak teori mengenai percakapan dimana penekanannya pada kekuasaan serta pengaruhnya pada kelompok budaya bersama dan ada pada tradisi kritis. Orbe memberikan penawaran sudut pandang yang berbeda dari teori mengenai percakapan pada umumnya.

Fokus dari teori ini sendiri adalah untuk memberikan suatu kerangka dimana para anggota kelompok Co-Cultural menegosiasikan usaha-usaha untuk melakukan interaksi dengan struktur masyarakat dominan. Ada dua premis teori yaitu para anggota kelompok Co-Cultural termajinalkan pada struktur masyarakat dominan. Premis kedua adalah para anggota kelompok Co-Cultural menggunakan gaya komunikasi tertentu untuk mencapai keberhasilan saat dihadapkan pada struktur masyarakat dominan yang opresif (Toomey:77). Terdapat tujuan fungsional saat individu melakukan adaptasi antar budaya dimana sesuai dengan proposisi teori adaptasi antarbudaya, komunikasi yang beradaptasi secara fungsional dan setara sehingga dapat memberikan fasilitas pada penyelesaian tugas.

Posisi sentral dari satu kelompok budaya yang dominan telah membuat kelompok budaya lainnya terpinggirkan dengan struktur masyarakat dominan (Orbe, 1998:3). Komunikasi Co-Culture mengacu pada interaksi di antara individu dari budaya bersama

yang berbeda. Borisoff dan Merrill menunjukkan adanya perbedaan Co-Culture dan komunikasi anggota kelompok dominan yang pada dasarnya merupakan perbedaan kekuatan relatif antara kedua kelompok ini dalam konteks situasi tertentu. Kelompok budaya yang kurang terwakili menganggap representasi ini umumnya mengalami bias etnosentris yang kuat.

Menurut Orbe (2005), komunikasi co-culture terjadi saat ada anggota kelompok yang kurang terwakili yang merasakan adanya perbedaan budaya yang menonjol ketika melakukan interaksi. Pada intinya, teori co-culture menelaah satu pertanyaan dasar yaitu bagaimana strategi anggota kelompok co-culture menggunakan komunikasi untuk menegosiasikan identitas budaya mereka dengan orang lain dengan label kelompok yang tersingkirkan. Teori co-culture dianut sebagai suatu sarana untuk mengakui bagaimana kelompok budaya dan sosial yang berbeda secara bersama ada serta menyoroti sifat statis serta cair dari status kelompok co-culture dan dominan. Umumnya, anggota kelompok dominan akan menciptakan ekspektasi serta standar komunikasi yang membuat anggota co-culture menjadi diam.

Teori co-culture dilandasi oleh lima asumsi dasar, antara lain:

- a. Pada setiap masyarakat, terdapat hierarki yang mengistimewakan kelompok orang tertentu.
- b. Terdapat berbagai tingkat hak istimewa dimana anggota kelompok dominan mempunyai akses untuk menduduki posisi kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem komunikasi dimana secara sadar atau tidak, struktur komunikasi mencerminkan, memperkuat, serta mempromosikan pengalaman komunikatif individu.
- c. Struktur komunikasi yang dominan menghambat kemampuan individu yang pengalaman komunikatifnya tidak dihargai dalam konteks komunikasi publik baik secara sadar atau tidak.
- d. Anggota kelompok co-culture mencerminkan susunan komunikatif yang beragam berdasarkan pengalaman hidup yang didasarkan oleh faktor individu serta budaya sehingga mereka berbagi posisi sosial yang sama serta menempatkan mereka sebagai kelompok terpinggirkan dan kurang terwakili dalam struktur budaya dominan.
- e. Untuk bisa menegosiasikan sistem komunikasi yang dominan, anggota co-culture secara strategis memberlakukan praktik komunikasi tertentu.

Menurut Orbe (1998), ada enam faktor spesifik yang diidentifikasi sebagai hal yang menonjol untuk proses praktik co-culture yaitu pengalaman individu, pendekatan komunikasi, hasil yang disukai, kemampuan biaya dan imbalan yang dirasakan, serta konteks situasional. Untuk pengalaman individu, pengalaman muncul sebagai faktor yang memiliki pengaruh dalam komunikasi co-culture. Pengalaman merupakan konsep yang mencakup semua hal seperti pesan dari orangtua, teman, sosialisasi melalui organisasi pendidikan dan spiritual, pengalaman masa lalu dengan anggota kelompok dominan, dan pengamatan orang lain. Pengalaman masa lalu yang dialami individu adalah pertimbangan penting pada proses terus-menerus, memilih, memikirkan, dan kemudian mengevaluasi praktik komunikasi co-culture sehingga setiap anggota budaya co-culture secara bersama mempunyai pengalaman yang berbeda dan kemungkinan memberlakukan praktik budaya yang berbeda juga. Setiap anggota kelompok budaya akan terlibat dalam suatu proses komunikasi yang kemudian bisa membentuk persepsi mengenai keefektifan komunikasi dengan kelompok budaya dominan.

Yang kedua adalah pendekatan komunikasi dimana hal ini memiliki fokus pada perilaku komunikasi yang mencerminkan point-point berbeda yang tidak tegas atau agresif. Dari perspektif anggota kelompok co-culture, pendekatan komunikasi yang tidak asertif mengutamakan kebutuhan dan harapan orang lain dibandingkan kebutuhan dan harapan diri sendiri. Pada pendekatan ini terjadi hambatan dalam komunikasi namun tidak ada tindakan konfrontatif yang dilakukan kelompok anggota budaya. Sedangkan agresif merupakan perilaku dimana individu menempatkan kebutuhan serta harapan mereka sendiri di atas orang lain. Komunikasi agresif mencakup tindakan yang ekspresif. Sedangkan pendekatan komunikasi asertif merupakan cerminan keseimbangan antara memperhatikan kebutuhan serta harapan diri sendiri dan orang lain yang memberikan kemungkinan anggota kelompok co-cultural bisa membela hal nya sendiri tanpa harus menginjak hak orang lain.

Untuk preferred outcome, mengacu pada hasil yang diinginkan oleh anggota kelompok co-culture untuk melakukan interaksi individu atau kolektif dengan individu lain. Yang pertama adalah dengan asimilasi dimana ini merupakan upaya untuk menghilangkan atau meremehkan perbedaan budaya supaya sesuai dengan masyarakat dominan. Asimilasi merupakan hasil alami sebagai bentuk partisipasi dan hasil dalam konteks sosial. Untuk akomodasi, merupakan cerminan hasil yang diinginkan dimana individu berkomunikasi dengan cara mempertahankan praktik budaya yang beda dari anggota kelompok dominan dengan tujuan untuk bekerja dalam struktur masyarakat

yang dominan dan membantu membuat mereka lebih mencerminkan pengalaman budaya bersama. Yang ketiga adalah pemisahan atau separasi dimana anggota co-culture menolak asumsi tradisional bahwa asimilasi itu ideal dan mengadvokasi nilai untuk menciptakan ruang sosial di mana anggota kelompok co-culture bisa mempertahankan tindakan interaksi, organisasi, serta komunitas yang mencerminkan nilai, adat-istiadat, serta norma mereka sendiri. Tujuan pemisahan ini adalah menjaga jarak psikologis dengan anggota kelompok dominan.

Faktor keempat yaitu kemampuan individu untuk menggunakan praktik yang berbeda dimana tidak semua anggota kelompok yang kurang terwakili mendapatkan kesempatan yang sama namun bisa untuk menarik dari beragam praktik co-culture tergantung pada karakteristik individu serta keadaan situasional. Faktor kelima merupakan biaya dan imbalan yang dirasakan dimana semua perilaku komunikatif mempunyai konsekuensi potensial dimana setiap praktik komunikasi co-culture memiliki dampak pada diri sendiri dan orang lain. Konsekuensi yang didapatkan dari praktik budaya bersama bisa positif atau negatif. Kesadaran yang tinggi mengenai hasil positif serta negatif yang terkait dengan setiap praktik budaya bersama ada untuk kelompok yang kurang terwakili. Biaya serta imbalan untuk memberlakukan praktik budaya bersama tidak dianggap sama untuk semua anggota kelompok budaya bersama. persepsi akan biaya dan penghargaan yang berbeda bergantung pada pengalaman dan preferred outcome dari anggota kelompok co-culture.

Yang terakhir adalah konteks situasional dimana ini memainkan peran dalam pemilihan praktik co-culture. Konteks situasional dikonseptualisasikan secara luas dengan melibatkan sejumlah isu termasuk lingkungan fisik, lokasi geografis, orientasi waktu, komunitas, atau sudut kota. Konteks situasional dipengaruhi oleh sifat interaksi privat atau publik serta ada atau tidaknya interaksi dengan anggota kelompok budaya lainnya.

Menurut Castle (2015), terdapat 9 orientasi komunikasi dalam teori co-culture, antara lain:

- a. Asimilasi non asertif: pilihan yang memungkinkan untuk individu yang sadar mengenai perbedaan kekuasaan serta menyadari biaya dan imbalan yang terkait dengan komunikasi budaya bersama dalam keadaan tertentu. Sikap ini menggunakan praktik budaya bersama dengan menekankan kesamaan, menghindari kontroversi, menyensor diri, dan berkembang wajah positif sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dominan.

- b. Asimilasi asertif: upaya individu untuk mengecilkan perbedaan budaya dan mencoba untuk masuk ke dalam masyarakat yang dominan dengan lebih tegas yang memberlakukan praktik budaya bersama dengan persiapan ekstensif, kompensasi berlebihan, manipulasi stereotipe, tawar-menawar, dan rasionalisasi. Kelompok yang terpinggirkan akan secara aktif berusaha untuk diterima dengan menyoroti kualitas kontribusi mereka sebagai individu.
- c. Asimilasi agresif: sikap ini memprioritaskan keinginan anggota kelompok budaya untuk berasimilasi dengan anggota kelompok dominan ke titik dimana hal, kebutuhan, dan keinginan orang lain diberikan sedikit atau tidak ada pertimbangan. Umumnya individu akan mengejek diri sendiri dan menjaga jarak.
- d. Akomodasi non asertif: adanya usaha untuk memperbaiki bagi anggota kelompok budaya bersama dimana anggota kelompok budaya bersama mengadopsi pendekatan komunikasi non asertif secara tidak konfrontatif. Pada pendekatan ini, dibutuhkan perubahan pada bidang pengalaman oleh anggota kelompok budaya bersama sehingga mereka bisa berhati-hati dalam melakukan interaksi.
- e. Akomodasi asertif: Orientasi pada akomodasi non asertif secara strategis mengistimewakan kebutuhan anggota kelompok dominan dengan mengundang terjadinya perubahan. Anggota kelompok yang kurang terwakili akan mengadopsi orientasi komunikasi ini untuk mengubah struktur dominan yang ada sehingga mereka semakin mencerminkan budaya bersama.
- f. Akomodasi agresif: Tujuan akhir individu melakukan akomodasi agresif adalah untuk menjadi bagian dari struktur masyarakat dominan dan kemudian bekerja dari dalam untuk mempromosikan perubahan. Untuk bisa mencapainya, harus ada upaya yang kadang bisa dilihat sebagai promosi diri yang terkesan memaksa. Umumnya tindakan ini dicirikan dengan taktik konfrontatif serta melakukan gerakan kekuatan untuk mendapat keuntungan.
- g. Pemisahan non asertif: pemisahan budaya terjadi hingga batas tertentu. Pemisahan non asertif ini diasumsikan melalui berbagai praktik budaya seperti menghindari anggota kelompok yang dominan, mengisolasi diri sendiri, dan mempertahankan hambatan antarpribadi. Individu akan cenderung melakukan penghindaran fisik, namun ketika memerlukan interaksi dengan budaya dominan, anggota kelompok akan mengadopsi perilaku tertentu meski akan ada

banyak pertimbangan untuk kebutuhan diri yang menciptakan jarak psikologis antara dua kelompok.

- h. Pemisahan yang tegas: Individu yang mengadopsi orientasi pemisahan tegas akan lebih percaya diri dengan upaya mereka untuk menciptakan ruang budaya bersama yang berfungsi secara produktif tanpa anggota kelompok dominan atau pengaruh mereka. Selain itu, deskripsi pengalaman hidup anggota kelompok budaya bersama juga menunjukkan jika praktik co-culture seperti mengkomunikasikan diri serta jaringan intragroup juga bisa berkontribusi untuk mencapai orientasi komunikasi pemisahan yang tegas. Kesengajaan merupakan pertimbangan yang penting karena anggota kelompok co-culture dapat memberlakukan praktik budaya bersama yang sama dalam upaya untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan.
- i. Pemisahan yang agresif: Sikap komunikatif ini diadopsi oleh anggota kelompok co-culture yang mengutamakan kebutuhan mereka untuk menjaga fisik serta jarak psikologis dari anggota kelompok dominan sebagai sarana untuk membangun pemisahan terlepas dari keinginan anggota kelompok dominan. Praktik komunikasi co-culture seperti menyabotase upaya kelompok dominan, intimidasi, dan serangan verbal.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan bahwa kecilnya persentase mahasiswa Etnis Tionghoa yang ada Perguruan Tinggi Negeri dikarenakan adanya prasangka negatif terhadap mahasiswa etnis non-Tionghoa. Selain itu peneliti juga mengasumsikan bahwa mahasiswa Etnis Tionghoa takut untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri karena merasa dirinya akan mendapatkan perlakuan kurang baik, mengingat bahwa sudah ada sentimen terhadap Etnis Tionghoa sejak masa kolonialisme yang memiliki efek hingga sekarang.

Mahasiswa Etnis Tionghoa lebih memilih untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Swasta untuk menghindari munculnya konflik sehingga ini bisa dinilai sebagai bentuk “avoidance” dan cenderung dianggap sebagai kelompok yang memisahkan diri dan tidak mau berbaur dengan kelompok lainnya. Asumsi ini dibangun berdasarkan teori co-culture dimana pada teori ini dijelaskan bagaimana anggota kelompok suatu budaya akan menggunakan strategi komunikasi tertentu saat mereka berinteraksi dengan struktur dominan yang opresif. Strategi komunikasi yang digunakan bisa dengan avoiding, bargaining, attacking, atau sabotaging.

Penulis berasumsi bahwa pengalaman serta histori budaya di masa lalu memiliki dampak yang kuat terhadap pengambilan suatu keputusan individu di masa kini. Persepsi negatif serta prasangka yang melekat pada suatu budaya tertentu juga membuat proses interaksi antar budaya tidak berjalan dengan baik.

Berangkat dari penjelasan inilah kemudian dibentuk sebuah asumsi penelitian dimana akan dilakukan upaya untuk mengetahui interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan etnis non-Tionghoa di Perguruan Tinggi Negeri.

1.7 Operasional Konsep

Peneliti akan menguraikan pengertian konsep terkait dengan topik penelitian sehingga ada keselarasan. Komunikasi antarbudaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa Etnis Tionghoa sebagai minoritas dengan mahasiswa non-Tionghoa melakukan interaksi di Perguruan Tinggi Negeri. Komunikasi antarbudaya bisa terjadi saat pengirim pesan merupakan anggota suatu budaya serta penerimanya adalah anggota budaya lainnya. Faktor terjadinya komunikasi antarbudaya, antara lain persepsi, nilai, emosi, latar belakang, peran, pengetahuan, dan hubungan. Adanya perbedaan budaya dan latar belakang yang berbeda antara mahasiswa Etnis Tionghoa dan etnis non-Tionghoa di Perguruan Tinggi bisa menimbulkan komunikasi antarbudaya yang terjalin antara komunikator dengan komunikan.

Prasangka merupakan antipati yang didasarkan pada generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak luwes. Antipati ini bisa dirasakan atau dinyatakan dan bisa ditunjukkan langsung kepada suatu kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep pemikiran yang nantinya akan berguna untuk mendukung analisis terkait interaksi antarbudaya yang terjadi di Perguruan Tinggi Negeri. Adanya prasangka memunculkan kemungkinan strategi yang digunakan oleh kelompok co-cultural kepada kelompok dominan. Yang pertama adalah asimilasi dengan menjadi bagian dari kultur dominan. Yang kedua adalah dengan akomodasi yaitu berusaha sehingga para anggota kelompok dominan bisa menerima anggota co-cultural. Dan yang terakhir adalah dengan memilih dan menolak kemungkinan ikatan bersama dengan para anggota kelompok dominan atau memisahkan diri.

Teori co-cultural yang dijelaskan oleh Mark Orbe menjadi konsep pokok mengenai bagaimana kelompok budaya minoritas berkomunikasi dengan anggota budaya dominan atau mayoritas. Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat hierarki dalam masyarakat yang

mengistimewakan kelompok budaya tertentu dimana dalam hierarki ini menunjukkan bahwa ada anggota dominan atau mayoritas. Sistem komunikasi dibentuk oleh kelompok dominan yang memiliki tujuan untuk menjaga anggota kelompok budaya pendamping untuk tetap berada di luar budaya dominan dimana hal ini membuat kelompok budaya minoritas merencanakan strategi untuk melakukan komunikasi dalam menghadapi sistem komunikasi dominan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe dan Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi memiliki tujuan untuk menguji bagaimana cara individu memahami pengalaman hidup mereka dan memiliki fokus sendiri kepada pengalaman hidup seseorang yang memiliki arti tertentu bagi setiap individu (Smith, 2009:7). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena pemilihan institusi yang dilakukan oleh mahasiswa Etnis Tionghoa.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu kelompok mahasiswa Tionghoa yang memiliki status sebagai mahasiswa di Kota Semarang. Penelitian ini akan menggunakan 6 informan untuk melakukan wawancara secara mendalam dimana informan merupakan mahasiswa aktif yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi di Kota Semarang dimana 3 informan merupakan mahasiswa Etnis Tionghoa yang aktif menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta dan 3 informan merupakan mahasiswa Etnis Tionghoa yang aktif menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.

1.8.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian kualitatif jenis data yang digunakan adalah jenis data yang tertulis yang dituangkan dalam kata-kata atau kalimat yang didapatkan melalui serangkaian proses wawancara dengan subjek penelitian serta studi literatur, data dari instansi terkait, serta sumber informasi dari portal media online. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan lewat wawancara yang mendalam dengan mahasiswa Etnis Tionghoa yang menempuh studi di perguruan tinggi di Kota Semarang.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bisa didapatkan dengan melakukan wawancara yang mendalam (*indepth interview*), yaitu wawancara yang dilakukan secara detail yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang dalam sehingga memperoleh pemahaman yang detail tentang fenomena yang akan dikaji. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan sumber.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang tidak terstruktur. Pedoman wawancara, peneliti tidak terpaku pada daftar pertanyaan, namun pertanyaan bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi serta ciri unik dari informan sehingga wawancara bisa mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari (Moleong, 2018:191). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data semi-structured dengan menyiapkan interview guide sebagai guidance dan kemudian mengembangkan kembali pertanyaan secara mendalam berdasarkan informasi yang disampaikan informan.

Proses utama dalam menggali informasi yang akan dikaji adalah tentang interaksi yang dilakukan oleh kedua kelompok budaya yang berbeda yaitu Etnis Tionghoa dengan etnis non -Tionghoa di Perguruan Tinggi Negeri serta faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Etnis Tionghoa dalam memilih perguruan tinggi.

1.8.5 Kualitas Data

Kualitas data ditetapkan melalui teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria tertentu yaitu kredibilitas (*trustworthiness*) yang terdiri dari derajat kepercayaan (*credibility*) serta kepastian atau *confirmability* (Moleong, 2018:324-326).

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Peneliti membuktikan keabsahan data lewat temuan penelitian yang bisa dibuktikan lewat pertanyaan hasil wawancara dengan informan mahasiswa Etnis Tionghoa di Perguruan Tinggi Negeri.

b. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian bahwa suatu hal bersifat objektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang kepada pandangan, pendapat, serta penemuan seseorang.

1.8.6 Analisis Data dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis fenomenologi interpretative (AFI) atau Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Menurut

Smith (2009:82-100), ada beberapa tahapan dari analisis fenomenologi interpretatif , antara lain:

a. Reading and re-reading

Peneliti akan menuliskan transkrip wawancara yang berbentuk rekaman suara ke dalam transkrip yang berbentuk tulisan dengan analisis yang lebih lengkap serta mengulangi pembacaan transkrip supaya peneliti bisa memahami secara mendalam.

b. Initial noting

Pada tahap ini peneliti akan menguji dari kata, kalimat, serta bahasa yang digunakan oleh subjek saat proses wawancara berlangsung dengan membaca kembali transkrip yang sudah dibuat pada tahap pertama dan peneliti akan menuliskan temuan-temuan yang dianggap menarik serta penting dari gtranskrip tersebut dan akan menghasilkan suatu komentar atau catatan khusus.

c. Developing emergent themes

Pada tahapan ini, peneliti akan membaca hasil transkrip secara berulang dan peneliti akan mengembangkan kemunculan dari tema yang ditemukan dalam transkrip tersebut.

d. Searching for connections across emergent themes

Setelah menemukan beberapa sub kategori tema dari transkrip yang sudah dibuat, peneliti akan mencari keterkaitan dari tema yang sudah ditemukan dan kemudian peneliti akan menguraikannya secara kronologis kemudian adanya hubungan dari antar tema yang ditentukan akan dikembangkan serta dibuatkan pemetaan atas tema yang berhubungan antara satu dengan lainnya.

e. Moving the next cases

Di tahap ini, peneliti akan mengaplikasikan tahapan 1-4 kepada semua kasus atau partisipan yang ada sehingga kasus tersebut bisa disebut selesai dan sudah terbentuk hasil dari analisis yang dilakukan. Kemudian peneliti akan berpindah pada kasus atau partisipan selanjutnya dengan mengulang proses yang sama hingga semua kasus atau partisipan sudah memenuhi tahapan 1-4 dan sudah terbentuk hasil analisisnya.

f. Looking for patterns across cases

Peneliti akan menemukan pola yang muncul dari antar semua kasus atau informan yang ada. Peneliti akan mencari adanya keterkaitan atau hubungan dari antar kasus yang ada serta tema yang sudah ditemukan.

1.8.7 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui bahwa proses penelitian ini masih terdapat keterbatasan penelitian serta kelemahan yang peneliti temui ketika penelitian ini berlangsung, diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data sekunder dari sumber terbaru di periode terdekat. Hal ini dikarenakan masih banyak data yang tahunnya sudah sangat lama dan beberapa belum diperbaharui
2. Keterbatasan peneliti dalam mencari responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.